

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Muhammad SAW telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun satu bentuk masyarakat yang disebut masyarakat madani yakni masyarakat berperadaban (*madaniah*), karena tunduk dan patuh kepada (*din*) atau peraturan. Sebuah bentuk *reformasi* total terhadap masyarakat yang tidak mengenal hukum (*lawless*) *jahiliah*

Semangat inilah yang seharusnya menginspirasi umat Islam hari ini, hingga tidak ada lagi ungkapan-ungkapan yang *memarginalkan* posisi kaum muslimin, dengan disandingkan kepadanya berbagai predikat “miring”. seperti : masyarakat miskin, terbelakang, tidak berpendidikan. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi pada diri umat Islam, mungkinkah hal ini berkaitan langsung dengan masalah yang menyangkut kebutuhan dasar manusia yakni pendidikan, lalu bagaimana pendidikan dimata masyarakat muslim, apapula yang dimaksud dengan pendidikan Islam, apa kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam dan kontribusi apa yang dapat diberikan masyarakat kepada penyelenggaraan pendidikan Islam, semuanya akan dibahas dalam tulisan dengan judul Manajemen Partisipasi masyarakat dalam Program Pendidikan Islam.

Sebuah arah baru pengembangan pendidikan islam yang lebih memberdayakan pendidikan Islam secara lebih *pluralis* dan kurikulum yang dipersiapkan untuk menghadapi perubahan global, mengembangkan *life skill*

dalam kurikulum PAI, menerapkan nilai-nilai life skill tersebut dalam pengamalan ajaran agama, serta *meredefinisi* atau mendefinisikan kembali *islamisasi* ilmu pengetahuan<sup>1</sup> menjadi sebuah upaya pemikiran kearah pencerahan pendidikan Islam di masa mendatang.

Untuk menjaga kelangsungan pendidikan Islam, dibutuhkan satu penopang yang harus bekerja secara *sinergis* yakni keluarga, sekolah, masyarakat dan Negara<sup>2</sup> Khusus berbicara tentang masyarakat sebagai salah satu penopang kesinambungan pendidikan Islam, maka partisipasi masyarakat adalah salah satu hal yang tidak mungkin dipisahkan dari masyarakat atau dengan kata lain masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam kesinambungan pendidikan islam.

Garis Garis Besar Haluan Negara (1993) mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Untuk menghasilkan produk pendidikan yang maju dan berkualitas maka ketiga pihak tersebut perlu saling membantu dan bekerjasama dengan baik, orang tua berkewajiban memberikan nilai-nilai dasar bagi pendidikan anaknya serta berhak mendapatkan informasi perkembangan pendidikan anaknya (pasal 7), masyarakat berkewajiban memberikan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan dan berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan (pasal 8 dan 9), sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik, menjamin

---

<sup>1</sup> Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam (Bandung: Nuansa, 2003), hal 147-165

<sup>2</sup> Syamsul Arifin, *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*, (Yogyakarta: Si Press, 1997) hal 37

peyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta penyediaan dana yang memadai bagi terselenggaranya pendidikan bagi warganegara dalam masa wajib belajar 7 sampai 15 tahun ( pasal 10 dan 11 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003).

Banyak kasus di lapangan yang penyelesaiannya menuntut kerjasama fihak fihak diatas, misalnya anak sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, tingginya angka putus sekolah, bahkan belakangan ini maraknya kasus penyalahgunaan obat terlarang dan pergaulan bebas di kalangan pelajar yang jelas akan merusak mental dan masa depan pelajar itu sendiri.

Narkotik dan obat terlarang lebih terkenal dengan narkoba dinyatakan telah menjadi bencana bagi Bangsa Indonesia yang harus diperangi secara terus menerus (UU No. 22 tahun 1997 dan UU No. 5 tahun 1997). Hasil riset UI menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada pelajar dan mahasiswa sejak tahun 2003 – 2006 meningkat dari 3.95 %, menjadi 5,3 % dengan jumlah total 1.037.682 siswa. Bahkan BNN ( badan Narkotika Nasional) mencatat usia pengguna narkoba termuda berumur 7 tahun dan 8000 anak SD akrab dengan barang terlarang ini. Kasus ini ditemukan di panti rehabilitasi ketergantungan obat, ini artinya bahwa usia tersebut bukanlah sekedar korban penyalahgunaan tapi sudah menjadi pengguna/ ketergantungan pada barang haram ini.

Kemudian hasil penelitian BNN dan UI tentang penyalahgunaan narkoba dalam 33 provinsi tahun 2006-2009 meningkat 1.4 % dengan rincian SLTP 4,2 %, SMA 6,6 % dan Mahasiswa 6,0 %.

Dalam harian Ekonomi Neraca per- April 2010,BNN mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam satu tahun terakhir meningkat 5,7 %, berarti dalam satu tahun terakhir setiap 100 orang pelajar dan mahasiswa terdapat 5 - 6 pemakai.

Selain kasus narkoba adapula kasus yang akhir-akhir ini menghantui masyarakat khususnya generasi muda yakni pergaulan bebas (seks bebas) yang ikut melanda para pelajar. Komisi perlindungan anak (KPA) mengungkapkan data bahwa 97 % remaja Indonesia pernah menonton atau mengakses pornografi, 93 % pernah berciuman, 62,7 % pernah berhubungan badan, serta 21 % remaja telah melakukan aborsi ( Kompas,Mei 2010)

Bertolak dari adanya kasus di lapangan serta upaya meningkatkan mutu/kualitas program pendidikan ,fihak sekolah harus berupaya memaksimalkan pendayagunaan sumberdaya yang ada di sekolah dan sumberdaya yang ada di tengah masyarakat dengan mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap program sekolah agar secara bersama-sama dapat menekan kasus-kasus yang sangat merugikan generasi bangsa,karena kasus semacam ini tidak mungkin dapat diselesaikan sendiri oleh fihak sekolah melainkan adanya kerjasama yang intensif antara sekolah dengan masyarakat baik masyarakat terorganisir maupun masyarakat umum dan tentu saja orang tua murid atau keluarga.

Namun Sahidu (1998) menyayangkan selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program pembangunan saja.

Kegiatan partisipasi masyarakat lebih difahami sebagai usaha mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau Negara, belum menyentuh pada pengambil kebijakan atau pengontrol kebijakan. Seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka dan perwujudannya dapat dilakukan secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Dalam hal ini sekolah sebagai penyelenggara pendidikan kiranya perlu memikirkan optimalisasi sumber daya masyarakat ini dan harus dikelola secara *manajerial* dan *professional*.

Partisipasi adalah sebuah sikap yang mencirikan masyarakat dinamis, Conyears (1994), mengidentifikasi tiga kebutuhan dasar dalam pembangunan masyarakat, salah satu diantaranya adalah partisipasi dalam membuat dan melaksanakan program, selain kebutuhan lainnya seperti pangan, sandang, dan papan, kemudian pendidikan, kesehatan dan air bersih.<sup>3</sup>

Mencermati teori Conyears, antara partisipasi dan pendidikan keduanya merupakan kebutuhan mendasar dalam pembangunan manusia, sangat dimungkinkan ketika pendidikan membutuhkan partisipasi sehingga menjadi salah satu modal utama pendidikan dengan menambahkan satu unsur penting diantara keduanya yakni manajemen. Mengapa manajemen karena tanpa

---

<sup>3</sup> Diana Conyears, Perencanaan Sosial di Dunia K (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1994), Hal 45.

manajemen seluruh potensi dan kekuatan yang ada tidak akan dapat bermanfaat secara efektif bagi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Sayyidina Ali RA pernah berkata : “ Kejahatan yang terorganisir dengan baik dapat mengalahkan kebaikan yang tidak dikelola dengan baik”<sup>4</sup> Pernyataan ini menggambarkan begitu besar komitmen Saidina Ali terhadap manajemen, sebagai upaya mendorong kum muslimin agar bekerja dengan perencanaan yang matang, proses yang rapi dan dinamis, dilakukan control yang cermat dan akurat serta evaluasi yang objektif, sehingga tujuan dapat dicapai dengan maksimal.

Dalam hal ini manajemen menjadi tugas penyelenggara dan pengelola pendidikan yakni pemerintah dan sekolah. Karenanya sekolah sebagai lembaga formal penyelenggaraan pendidikan harus terus berupaya memelihara (maintenance) partisipasi masyarakat dengan menerapkan konsep manajemen yang baik dengan tawaran program yang mampu menarik simpati dan menambah gairahnya untuk berpartisipasi dan tentu saja program tersebut harus dapat menjawab tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara signifikan.

Peranserta masyarakat menjadi isu penting dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam program pendidikan serta lahirnya sebuah tawaran manajemen berbasis sekolah (SBM) yang memberi otonomi relatif luas kepada sekolah dan masyarakat. Pada Bab III pasal 8 dinyatakan bahwa “ *masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi*

---

<sup>4</sup> Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariat dalam Praktek (Jakarta:Gema Insani, 2005) Hal.4

*program pendidikan*”<sup>5</sup> ini menandakan bahwa eksistensi dan partisipasi masyarakat semakin diakui dan dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan Islam.

Selain jaminan Undang-Undang akan pentingnya partisipasi masyarakat, adakah kemudian yang memotivasi masyarakat secara mandiri untuk ikut menentukan nasib pendidikan bangsa, terlebih lagi kesinambungan pendidikan Islam yang berlangsung secara formal di sekolah .Sementara kita ketahui bahwa sekalipun tugas penanam akidah adalah kewajiban orang tua di rumah tetapi akan sangat tidak menjamin juga lembaga keluarga sebagai lembaga nonformal, tidak memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan manajemen yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik sekalipun hanya lingkup naggotanya sendiri. Maka fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang mempunyai manajemen tersendiri dalam pengelolaan pendidikan , keberadaannya semakin dibutuhkan..Karenanya *kolaborasi* antara masyarakat dengan lembaga harus dikembangkan secara , merngingat adanya kepentingan dan cita cita yang sama yakni menyelamatkan dan mencerahkan masa depan generasi bangsa. Bagaimana sekolah kemudian memfasilitasi masyarakat untuk ikut memberikan sumbangsih secara moril maupun materiil dalam rangka mendukung tercapainya cita—cita pendidikan Indonesia khususnya pendidikan islam.

Mahdi (2005),dalam bukunya, *Biografi Rasulullah Sebuah Studi Analisis berdasarkan Sumber Sumber otentik*, menggambarkan sebuah potret pertisipasi

---

<sup>5</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hal 87

masyarakat Islam ketika peristiwa hijrah Rasulullah ke Medinah, kaum muslimin berbondong-bondong untuk ikut hijrah bersama Rasulullah meninggalkan seluruh harta benda, keluarga dan kebanggaan kebanggaannya demi satu niat dan tujuan yang sama yakni meraih ridha Allah SWT.

Dan ketika sampai di Medinah Rasulullah kemudian menambatkan untanya pada sebuah lahan milik yatim kembar dari Bani Najjar ,Suhail dan Sahal, karena telah lama unta Rasulullah mendekam di lahan itu, beliau kemudian menawarnya dan berniat untuk membayar tanah tersebut,namun kedua anak yatim itu menjawab, “wahai rasulullah, kalau engkau berkenan, kami akan menghibahkan tanah ini kepadamu” dan melalui ahli warisnya serta pembesar Bani Najjar, Rasulullah hendak melaksanakan transaksi jual beli, namun kemudian mereka berkata, “ Demi Allah kami tidak akan meminta bayaran darimu kecuali kepada Allah SWT.”<sup>6</sup>

Dalam riwayat kemudian tanah itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya mesjid pertama yang difungsikan untuk ibadah dan pendidikan di kota Medinah.

Partisipasi yang didasari oleh kesadaran dan ketulusan niat untuk ibadah tergambar jelas dalam riwayat tersebut .Kedekatan ummat dengan pribadi seorang pemimpin pembawa risalah kebenaran seperti Rasulullh mampu memotivasi ummat untuk berperan serta dalam proses perjuangan menegakkan kebenaran.,memajukan ummat dan meninggikan nilai Islam .Semangat ini sangat

---

<sup>6</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad,Biografi Rasulullah Sebuah Studi AnalitisBerdasarkan Sumber-Sumber otentik (Jakarta: Qiathi Press.2005) hal 353

mungkin tergambar kembali ketika lembaga pendidikan sekolah mampu memfungsikan dirinya sebagai lembaga penegakan nilai-nilai kebenaran.

Menurut Nasution (1999), bagi masyarakat, hakekat pendidikan diharapkan mampu berfungsi sebagai penunjang bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya kepada generasi mudanya. Tiap masyarakat selalu berusaha untuk meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan (sekolah) atau secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses *sosialisasi*<sup>7</sup>

Dengan jaminan Undang-Undang serta kesadaran yang penuh dari masyarakat untuk berpartisipasi kiranya belum cukup untuk mengharapkan terwujudnya satu bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, apabila sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tidak mampu mengelola potensi dan memanfaatkan yang ada melalui system manajemen yang baik yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat pendidikan dalam arti luas.

Masyarakat sebagai pemilik kontribusi terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kiranya perlu dikelola secara manajerial agar sumber daya tersebut dapat digali lebih optimal dan membarikan manfaat sebesar

---

<sup>7</sup> Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 1999) hal 117

besarnya bagi pendidikan sehingga pada saatnya pendidikan akan menjadi milik masyarakat sepenuhnya, pendidikan dari oleh dan untuk masyarakat.

#### B. Fokus Penelitian

Sebagaimana yang tergambar dalam latar belakang, penelitian ini difokuskan pada bentuk manajemen yang diterapkan oleh MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam program pendidikan Islam, faktor yang mempengaruhi terjadinya partisipasi, bentuk partisipasi dalam mendukung pendidikan Islam di MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut

#### C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam progrn pendidikan Islam di MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
3. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalm program pendidikan Islam di MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perumusan konsep manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam di sekolah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun hipotesis bagi penelitian kemudian dalam wilayah kajian yang sama.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pengambilan kebijakan bagi pemerintah, praktisi pendidikan, kepala sekolah, pendidik, pemerhati dan pengamat pendidikan. Islam untuk kemajuan dan pengembangan lembaga pendidikan kedepan.

### E. Definisi Operasional

Penelitian merupakan kegiatan pencermatan, penyelidikan atau istilah lainnya berkaitan dengan keingintahuan mengenai sesuatu yang menarik perhatian. Dalam Penelitian ini, yang menjadi variabel yang akan dianalisis yaitu Partisipasi Masyarakat dalam bidang Pendidikan.

Mohd Nazir<sup>8</sup> mengemukakan bahwa : Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable tersebut.

Agar tidak menimbulkan kesaalahan persepsi mengenai masalah yang akan diteliti, serta dapat menjadi arah bagi penelitian, maka diperlukan penjelasan

---

<sup>8</sup> Mohd. Nazir, 2003 hal 206

mengenai pengertian dan makna dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

Manajemen adalah mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah, efektif dan efisien serta dilaksanakan secara *professional* dan *proporsional*.

Partisipasi adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan, antusiasme dan inisiatif yang menggambarkan minat dan upayanya dalam turut menciptakan dan menjaga situasi belajar agar lebih kondusif

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan dan norma yang mengatur hubungan satu sama lain

Sekolah adalah suatu sistem administrasi yang modern yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang didalamnya berlangsung proses pendidikan

#### F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengungkap tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan seperti penelitian yang dilakukan oleh Rustam Effendi (2012), telah menemukan bahwa partisipasi masyarakat melalui wadah komite sekolah sebagai pendukung Madrasah Aliyah di Marabahan oleh adanya kerjasama, keterbukaan dan kekompakan, kepedulian dan persamaan persepsi dalam meningkatkan mutu pendidikan, melaporkan bahwa keterlibatan orang tua secara praktis di sekolah mampu meningkatkan produktivitas sekolah.

Muhammad Thahir (2013) menemukan bahwa manajemen partisipasi komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator berkaitan dengan perencanaan identifikasi sumber daya pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan RAPBS/M sekolah, pengelolaan keuangan dan evaluasi laporan keuangan .

Tesis Duki (2002) , yang meneliti tentang hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan Islam, menemukan bahwa prinsip keadilan , kedisiplinan, toleransi ,kebijaksanaan, keteladanan, nasehat dan argumentasi yang baik merupakan strategi pengembangan kehumasan

Muhammad Ramli dalam tesisnya (2008),yang ingin mengetahui tentang manajemen yang diterapkan sekolah dalam membangun partisipasi masyarakat, menemukan bahwa manajemen yang dikembangkan oleh sekolah adalah manajemen partisipatif berupa finansial dan idea atau gagasan.

Adapun peneliti ini ingin mengungkapkan manajemen yang diterapkan oleh MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut dalam menggalang partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pendidikan Islam . Kalau penelitian sebelumnya, Komite sekolah sebagai objek penelitian, tetapi penelitian ini bukan hanya kepada Komite sekolah tetapi kepada masyarakat umum baik masyarakat terorganisir maupun yang tidak terorganisir, serta faktor-faktor apa yang mendorong dan apa yang menghambat partisipasi dan mengungkapkan pula apa bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam pada dua lembaga yang bersangkutan

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis yang menuliskan kajiannya tentang manajemen partisipasi masyarakat di MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut secara keseluruhan terdiri dari enam bab, yang masing-masing disusun secara rinci dan sistematis dengan penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan dari keseluruhan bab yang bersifat sebagai pengantar. Di dalam bab tersebut, dipaparkan latar belakang masalah, selain itu, di dalam bab ini juga berisikan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian studi terdahulu yang erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi dengan manajemen partisipasi masyarakat, serta sistematika pendidikan sebagai pijakan pengkajian selanjutnya.

Bab II kajian teoritik berisikan tentang kajian teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli manajemen dan para peneliti terdahulu yang erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi di MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut dan memiliki relevansi dengan fokus dan masalah-masalah yang akan dibahas dalam studi ini sebagai alat analisis untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

Bab III metode penelitian, berisikan pendekatan dan jenis penelitian; kehadiran peneliti; sumber data; prosedur pengumpulan data; pengecekan keabsahan data; beserta cara mensistematisasikan data-data serta paparan data yang dipergunakan untuk menggali data yang telah difokuskan pada bab sebelumnya sehingga fokus studi dan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya dapat terjawab sesuai dengan tujuan yang diharapkan secara sistematis dan empirik.

Bab IV pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban sistematis dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, bab ini berisikan hasil temuan yang terdiri dari manajemen partisipasi masyarakat yang mencakup : Upaya MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut dalam menggalang partisipasi masyarakat, serta bentuk partisipasi masyarakat terhadap MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut.

Bab V berisikan pembahasan atau diskusi hasil temuan studi yang merupakan bab inti. Di dalam bab ini membahas tentang hasil temuan studi, yaitu mengklarifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang telah dirumuskan pada bab I dalam relevansinya dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab II yang telah dikaji dan secara sistematis dengan metodologi seperti dikemukakan pada bab III dan dipaparkan pada bab IV dari hasil penelitian yang membahas manajemen partisipasi masyarakat ,dalam menggalang partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat terhadap MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut.

Bab VI merupakan penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dari saran-saran terkait dengan persoalan-persoalan yang menonjol dari temuan hasil studi yang dikemukakan pada bab IV dan bab V. Persoalan-persoalan tersebut, dapat berupa hal-hal menarik yang belum terungkap dan terpecah dalam studi ini sehingga menjadi bahan kajian peneliti berikutnya

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. URGENSI MANAJEMEN PADA ORGANISASI PENDIDIKAN

Sesungguhnya manajemen awalnya dikenal dalam ilmu ekonomi dan bisnis, yang berkonsentrasi pada keuntungan (profit) dan bersifat komersial. Namun seiring perkembangan, kemudian manajemen merambah ke dunia pendidikan, nampaknya manajemen sangat dibutuhkan dalam aktivitas organisasi. Tanpa manajemen roda organisasi tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Ali bin Abi Thalib Karamullahuwajhah, menggambarkan betapa kebathilan yang diorganisir dengan rapih dapat

mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisir (*alhaqqu bilaa nizhomin yaghlibu binizhomin*)<sup>9</sup>

Organisasi dengan pendekatan manajemen yang rapih akan mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individual. Demikian pula halnya dengan organisasi pendidikan, dalam mengupayakan peningkatan mutu lembaga pendidikan, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan tolok ukur antara lain: (1) Proses pendidikan yang berjalan di sekolah tersebut (2) Kelengkapan sarana dan prasarana (3) Profesionalitas tenaga kependidikan atau sumber daya manusia (4) Prestasi akademik peserta didik dan (5) Kualitas Manajemen Sekolah<sup>10</sup>, namun Sergiovanni, menekankan, diantara indikator ini, manajemen sekolah menduduki posisi strategis<sup>11</sup>

Lembaga yang secara langsung mengelola pendidikan adalah sekolah karenanya *eksistensi* sekolah sangat dibutuhkan masyarakat. Sekolah kini telah menjadi alternative utama karena system manajemen modern yang dikembangkan sebagai sarana pembelajaran. Sekolah dianggap sebagai sebuah system yang secara khusus terkait dengan proses belajar mengajar atau proses pendidikan.<sup>12</sup>

Tempat untuk mengkaji keilmuan lebih intensif dan sistematis terletak di sekolah atau di madrasah. Semasa Rasulullah mesjid yang dibangun menjadi

---

<sup>9</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2005) Hal:4

<sup>10</sup> Achmadi, Beberapa Agenda Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Padang, Makalah Temu Nasional Manajemen Pendidikan dalam Rangka MEnyongsong 50 Tahun KEMerdekaan RI dan Dies Natalis XLI IKIP Padang, 1 September 1995)

<sup>11</sup> Sergiovanni, THE Principalship; A Reflective Practice perspective (Boston: Allyn And Bacon, Inc 1987)

<sup>12</sup> Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1977) , hal 25

lembaga pendidikan formal bagi semua orang dan ilmu yang diajarkan tidak semata-mata ilmu diniyah tetapi juga ilmu terapan bahkan tempat menyusun strategi perang.<sup>13</sup>

Sekolah atau madrasah sebagai bagian integral dari masyarakat, dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Dalam peransosialnya sekolah merupakan system terbuka dimana organisasi mengambil manfaat dari lingkungan, mengalihkan ke produksi luar. Sebagai contoh sekolah mengambil tenaga kerja, murid dan uang dari lingkungan dan adanya subyek kepada proses transformasi pendidikan untuk menghasilkan dan mendidik murid dari masing-masing tingkat<sup>14</sup>

Meskipun organisasi menyediakan informasi dan kenyataan untuk membuat keputusan dengan memakai rasio, hal ini terbatas pada kemampuan untuk menunjukkan dan memproses informasi, mencari alternative dan memprediksi konsekwensi yang ada.<sup>15</sup> Maka dengan sisten terbuka ada potensi untuk memberi peluang bagi lingkungan *eksternal* untuk ikut menentukan arah dan tujuan sekolah. Wals dalam Made Pidarta (2004) memberi alasan karena masyarakat memandang sekolah sebagai cara meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa karena itu masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hal 117

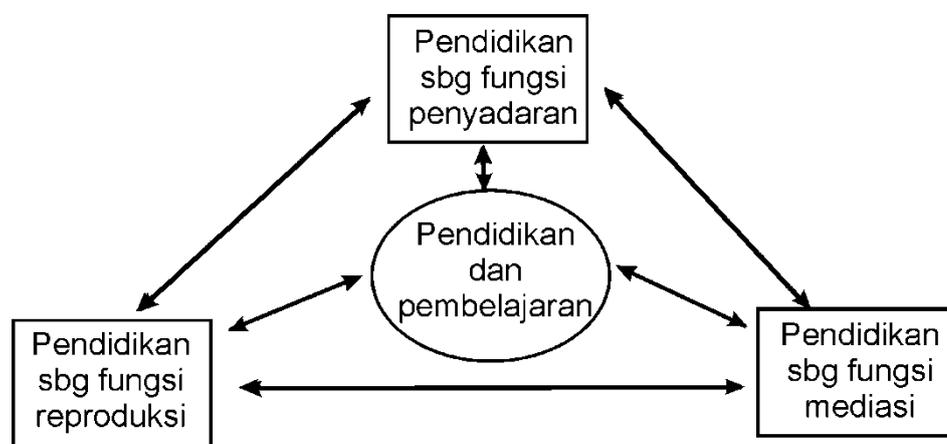
<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Sylvana Murni, Education Managemen, Analisis Teori dan Praktek (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hal 198

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Jakarta; Rieneka Cipta, 2004), hal 185

Sudarwan Danim (2006), membagi tiga pilar fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang *dikonsepsikan* untuk mengemban fungsi, *reproduksi*, *penyadaran*, dan *mediasi* secara simultan, sehingga nampak bahwa sekolah *identik* dengan jaringan-jaringan kemasyarakatan <sup>17</sup> sebagaimana yang nampak pada gambar berikut :

Tiga pilar yang dimaksud Nampak dalam gambar berikut



Gambar 1. Tiga Pilar Fungsi Sekolah (Sudarwan Danim, 2006)

Nasution (1984) menjabarkan lagi fungsi sekolah sebagai berikut :

1. Sekolah mempersiapkan anak-anak untuk suatu pekerjaan
2. Sekolah memberikan ketrampilan dasar

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal. 2

3. Sekolah memberikan kesempatan memperbaiki nasib
4. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan
5. Sekolah membantu memecahkan masalah social
6. Sekolah mentransmisikan kebudayaan
7. Sekolah membentuk manusia sosial
8. Sekolah merupakan alat transformasi kebudayaan<sup>18</sup>

Sekolah merupakan satu system administrasi modern yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang didalamnya berlangsung proses pendidikan. Profil inilah membuat sekolah menjasi alternatip utama dalam menjalankan fungsi pendidikan dengan mengambil alih sebgaiian fungsi keluarga atau masyarakat yang selama ini menjadi lembaga pendidikan informal bagi anggota-anggotanya.<sup>19</sup>

Sistem disini diartikan sebagai suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis, bagian-bagian tersebut berhubungan satu sama lain serta peduli terhadap konteks lingkungannya.<sup>20</sup>

Kalau satu sekolah dipandang sebagai sebuah system, maka system yang ada di sekitarnya seperti perumahan, pasar, pertokoan, lading, sungai, jalan, dan sebagainya disebut supra system. [Bila system berhubungan dengan

---

<sup>18</sup> S.Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal 15-16

<sup>19</sup> Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hal. 26

<sup>20</sup> Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hal 25.

suprasistemnya, maka dianggap sebagai system terbuka dan bila tidak, maka disebut system tertutup.<sup>21</sup>

Sebagai bahan acuan, berikut adalah syarat-syarat sebuah system dikatakan sebagai system terbuka :

1. Mengimpor energi, materi dan informasi dari luar
2. Memiliki Pemrosesan.
3. Menghasilkan output atau menghasilkan materi, energi dan informasi.
4. Merupakan kejadian yang berantai
5. Memiliki negative entropy, yakni usaha untuk menahan kepunahandengan cara membuat impor lebih besar daripada ekspor.
6. Mempunyai alur informasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri
7. Ada kestabilan yang dinamis
8. Memiliki diferensiasi, yaitu spesialisasi-spesialisasi
9. Ada prinsip equifinality yakni banyak jalan untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>22</sup>

Dengan demikian, masyarakat telah menerima esensi dan urgensi pendidikan persekolahan, dalam segala jenjang dan jenisnya, untuk menjadi wahana dalam proses kemanusiaan dan pemanusiaan

---

<sup>21</sup> Abdul latif, Pendidikan berbasis nilai Kemasyarakatan (Bandung: Rafika Adhitama, 2009) , Hal. 27

<sup>22</sup> Ibid hal 28

Masyarakat telah memahami bahwa kontribusi lembaga persekolahan sangat signifikan dalam pencapaian misi Negara untuk mencerdaskan bangsa, karenanya perlu difahami bahwa partisipasi masyarakat adalah bagian terpenting yang ikut menentukan jalannya roda organisasi sekolah menjadi lebih optimal.

## B. KONSEP MANAJEMEN DALAM ISLAM

### 1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari Bahasa Latin yakni dari kata manus yang berarti tangan, dan agree yang berarti melakukan, kemudian digabung menjadi kata manajer yang artinya menangani. Lalu diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dan dalam bentuk kata benda menjadi managemen, adapun dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti pengelolaan.<sup>23</sup>

Istilah manajemen mengacu kepada proses aktivitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendayagunaan orang lain. Hal ini sejalan dengan batasan yang dikemukakan oleh Parker dalam Stoner & Freeman (2000), mengartikan manajemen sebagai the art of getting things done through people, yakni seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang<sup>24</sup>

Sebuah batasan sederhana namun cukup memberi gambaran bahwa manajemen menjadi sebuah strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada

---

<sup>23</sup> Husaini usman, Manajemen Teori, Praktek dan riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.4

<sup>24</sup> Stoner, J.A.F & Freeman, Management, 3 th Edition. (Englewood: Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall International edition, 1992)

dalam organisasi yang tentu saja mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian dalam Arikunto menjelaskan, manajemen adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.<sup>25</sup>

Selain manajemen adapula dikenal istilah *administrasi*, keduanya mempunyai kesamaan dalam arti luas, yakni proses kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara efektif dan efisien.<sup>26</sup> Dalam Bahasa Inggris kata *administration* dan *management* digunakan dalam konteks dengan beberapa macam pengertian, namun dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus. Dan pada awalnya kata *administration* banyak digunakan untuk organisasi social sedang manajemen untuk organisasi komersial.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sutisna (1987) mengemukakan bahwa dibidang pendidikan, pemerintahan, rumah sakit, dan kemiliteran umumnya memakai istilah administrasi, sedangkan dibidang industry dan perusahaan digunakan istilah manajemen.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Suharsismi Arikunto dan Mulya yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008) Hal: 8

<sup>26</sup> Hendyat sutopo, Manajemen Pendidikan, Bahan Kuliah Manajemen Pendidikan Bagi Mahasiswa S2, Universitas Negeri Malang, 2001

<sup>27</sup> Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, Edisi Kedua, Jakarta

<sup>28</sup> Ibid hal

Setelah dipopulerkannya karya ilmiah Taylor yang berjudul *Shop Manajemen* pada tahun 1903 dan *Principle And Methods of Scientific Management* pada tahun 1911.<sup>29</sup> Sejak itulah Amerika mulai menggunakan istilah manajemen dalam organisasi-organisasi komersialnya.

Pada dua dekade terakhir, para pembelajar dan pengkaji manajemen pendidikan merasa lebih nyaman dan lebih bergengsi menggunakan istilah manajemen daripada menggunakan istilah administrasi pendidikan. Terbukti dengan dibukanya banyak jurusan manajemen pendidikan daripada jurusan administrasi pendidikan, bahkan pada tahun 2005 jurusan administrasi pendidikan pada salah satu Perguruan Tinggi mengubah namanya menjadi Manajemen Pendidikan.<sup>30</sup>

Dilihat dari system pelaksanaannya manajemen dapat dikategorikan pada : (1) manajemen ilmiah (scientific management) yaitu manajemen yang dicirikan oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah, (2) manajemen tertutup mempunyai ciri dimana pemimpin membuat keputusan tanpa mengadakan konsultasi atau meminta pendapat dari bawahannya, (3) manajemen terbuka (open management) yaitu suatu system pelaksanaan manajemen, dimana seorang manajer atau pimpinan sebelum mengambil keputusan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada bawahannya untuk memberikan saran atau pendapat, walaupun keputusan terakhir berada pada pimpinan.

## 2. Prinsip-prinsip Manajemen Islam.

---

<sup>29</sup> Ibid hal 4

<sup>30</sup> Ibid hal 7

Manajemen sebagai suatu ilmu dan teknik untuk mengurus atau mengelola oleh effendi(1986) mengatakan tidak lepas dari fungsi-fungsi dan kewajiban manusia yang ditetapkan Allah SWT. Antara lain : (1) fungsi manusia sebagai khalifah Allah ,(2)kewajiban manusia mengemban amanat Allah,(3)perjanjian manusia dengan penciptanya,(4) hakekat eksistensi manusia di muka bumi..

Prinsip efektifitas dan efisiensi sangat jelas terlihat dalam surah Almu'minun ayat 1 dan 3, yang berbunyi :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3)

Artinya (1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman

(2) Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna,<sup>31</sup>

Ayat diatas memberi pengertian bahwa segala sesuatu yang tidak jelas arah tujuannya menggambarkan ketidakefektifan sebuah pekerjaan karenanya islam menyuruh orang mu'min untuk meninggalkannya.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen jelas menjadi bagian dari syariat islam dimana manajemen mengandung pengertian mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan terarah, efektif dan efisien swerta dilaksanakan secara *professional* dan *proporsional*

Adapun prinsip-prinsip manajemen yang dimaksud adalah :

#### 1. Perencanaan

---

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, Trjamah Al-Qor'anul Karim,(Bandung:PT Alma'arif,1988), hal 309

Sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang sangat populer di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa niat (innama al-a'maalu bin-niati) atau dalam bahasa manajemen disebut planning menjadi sandaran dan rujukan utama sebuah aktivitas, bahkan pakar-pakar manajemen mengungkapkan 69 % keberhasilan suatu aktivitas terletak pada kematangan menyiapkan perencanaan.<sup>32</sup>

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal<sup>33</sup> serta tidak terjadi dengan sia-sia. Dalam hal ini firman Allah dalam Surat Shaad ayat 27 memperkuat prinsip perencanaan yakni :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“ Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya tanpa hikmah (sia-sia), yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”

Konsep perencanaan terlihat jelas dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya bahwa Allah telah merencanakan segala sesuatu dengan jelas dan matang bahkan usia manusia pun telah direncanakan panjang pendeknya.. Dalam Al-Qor'an manusia disuruh memperhatikan dan mempersiapkan bekalnya untuk hari esok dalam Surat Al-Hasyr ayat 18 Allah menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

<sup>32</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: alfabeta, 2008). Hal 101

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Prinsip perencanaan yang visioner nampak jelas dalam ayat tersebut konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang dibuat harus memperhatikan yang dilalui, yakni masa lampau, masa kini dan prediksi masa yang akan datang.. Dalam melakukan perencanaan masa depan diperlukan kajian masa kini dan menjadikan masa lampau sebagai bahan evaluasi yang sangat berharga.. Begitu pentingnya perencanaan masa depan, ada dikenal ilmu yang membahas dan meramal masa depan yang disebut ilmu *'futuristic'*<sup>34</sup> demikian pentingnya sebuah perencanaan karena menjadi bagian utama dari sebuah kesuksesan.

## 2. Pengorganisasian

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah tetapi lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapih dan terarah.<sup>35</sup>

Dalam menerapkan prinsip pengorganisasian yang baik, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwa Rasulullah telah bersabda :”  
*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jika melaksanakan sesuatu*

---

<sup>34</sup> Ishak Arep dan Hendri Tanjung, *Manajemen Sumber Daya manusia*, (Jakarta Trisakti, 2002) hal.

19

<sup>35</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syari'at*, hal 101

*pekerjaan dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)*”<sup>36</sup>, demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ya’la, Rasulullah SAW bersabda; *Allah mewajibkan kepada kita untuk berperilaku ihsan dalam segala sesuatu.*”<sup>37</sup> Kata Ihsan bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal, tidak boleh seorang Muslim melakukan pekerjaan tanpa perencanaan, tanpa adanya pemikiran dan tanpa adanya penelitian sebelumnya.<sup>38</sup>

Dalam Surat Ash-Shaff ayat 2 sampai 4 disebutkan pula prinsip pelaksanaan dan pengorganisasian, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبِيرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ (4)

*“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan –Nya dalam barisan yang teratur seakan akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (Q.S Ash-Shaff ayat 2-4)*

Prinsip pengorganisasian dalam Islam antar lain mengatur tentang struktur kepemimpinan, wewenang dan tanggungjawab, pendelegasian wewenang dan konsepsi syuro.<sup>39</sup>

#### a. Struktur Kepemimpinan dan Amanah

Kepemimpinan yang memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan petunjuk adalah sebuah keniscayaan dan perkara yang lazim untuk menjalankan

<sup>36</sup> Ibid hal 1

<sup>37</sup> Ibid hal. 2

<sup>38</sup> Ibid hal 9.

<sup>39</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah .Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (Jakarta, PT.Raja Garafindo Persada, 2006) Hal.90

kehidupan masyarakat<sup>40</sup> Jika dalam sebuah perjalanan saja rasulullah memerintahkan salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin maka hal ini merupakan keniscayaan dan kewajiban yang harus ada dalam masyarakat guna mengatur kemaslahatan hidup mereka. Pemimpin yang melekat dalam dirinya kekuasaan hendaknya dimaknai sebagai suatu amanah sekaligus peluang yang diberikan oleh Allah SWT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pembagian tugas dan wewenang adalah prinsip pengorganisasian dalam ISLAM. Wewenang bermakna kekuasaan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh bawahan dan mentaatinya<sup>41</sup> Wewenang akan semakin besar jika kedudukan seseorang dalam organisasi semakin tinggi. Ketinggian kedudukan dan kebesaran wewenang pada diri seseorang hendaklah disertai keinginan yang kuat untuk menjalankannya berdasarkan ketentuan, hal ini kemudian disebut dengan amanah.<sup>42</sup> pemimpin yang menjalankan kewenangannya dengan penuh amanah adalah prinsip kepemimpinan dalam organisasi Islam.

Adanya strata kepemimpinan (kekuasaan) bukan berarti pemimpin dapat terpisah dengan yang dipimpinnya, kepemimpinan dalam Islam bukanlah kekuasaan yang terpisah dan sentralistik dalam menetapkan keputusan, melainkan setiap keputusan yang diambil harus melalui mekanisme yang disebut musyawarah. Namun Islam tetap mengajarkan kepada manusia untuk taat

---

<sup>40</sup> Ibid hal 9

<sup>41</sup> Ibid hal.94

<sup>42</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari'at, Hal 102

kepada pemimpin sejauh pemimpin itu membawa umatnya taat kepada Allah dan Rasulnya.

Dalam konteks Islam, kepemimpinan yang terbentuk dalam berbagai level manajemen seharusnya tidak boleh terjadi pertentangan, karena sesungguhnya mereka duduk dalam satu wadah manajemen yang dibangun dengan *konsep syuro* (musyawarah)<sup>43</sup>. Adanya perbedaan level manajemen dan bidang yang digarapnya tidak berarti mereka bekerja sendiri-sendiri tetapi harus saling berkontribusi satu dengan lainnya untuk tujuan bersama (tujuan organisasi)

#### b. Pembagian Tugas dan Pendelegasian wewenang.

Setinggi apapun kedudukan dan sebesar apapun wewenang yang ada di tangan seorang pemimpin tetap saja terdapat keterbatasan, sehingga Islam sangat mengenal adanya pendelegasian wewenang sebagai langkah antisipatif terhadap keterbatasan pemimpin itu sendiri. Walaupun banyak pemimpin sekarang yang masih berlaku seperti *single fighter* (Pemain tunggal) ia lupa bahwa ada saatnya seorang pemimpin kurang kesempatan, jatuh sakit dan sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah banyak mencontohkan pendelegasian wewenang kepada para sahabat yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan, keahlian dan kecenderungannya masing-masing. Semangat pendelegasian ini diawali dengan pendekatan yang lemah lembut dan musyawarah diantara mereka. Dalam Surah Ali Imran 159 Allah berfirman :

---

<sup>43</sup> Ibid hal 93

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

*“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian jika kamu telah membulatkan tekad. Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*

Pendelegasian wewenang dimaksudkan agar setiap bagian dapat menjalankan segala aktivitas manajerial dan pada saatnya dapat dituntut tanggungjawab terhadap tugas yang didelegasikan kepadanya, dalam hal ini perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Keseimbangan ini mewujudkan mekanisme kerja yang sehat dan dapat memotivasi bawahan untuk lebih percaya diri, bekerja lebih baik dan kreatif serta penuh tanggung jawab.

Dalam Ibrahim (2006), diceritakan pada masanya, Rasulullah SAW menjalankan fungsi pendelegasian ini ketika Allah menurunkan ayat larangan minum khamar, Rasulullah kemudian memanggil Umar bin Khattab untuk menjalankan perintah Allah ini. Umar dinilai mempunyai dasar ilmu pengetahuan dan kuat dalam menjalankan agama. Umar diperintahkan Rasulullah untuk berkeliling di pasar-pasar dan memecahkan semua botol minuman anggur yang ditemuinya.<sup>44</sup> Dan masih banyak riwayat lain yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat.

---

<sup>44</sup> Ibid hal 95

Selain penerapan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana diuraikan diatas, pembagian tugas yang tepat dan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai ( *professional dan proporsional*) yang dalam kajian manajemen dikenal dengan istilah *job analysis dan job description*, Rasulullah mencontohkan dalam sebuah riwayat ketika pembangunan mesjid pertama di kota Medinah diceritakan oleh Thalaq ibn Ali Al-Hanafi bahwa Rasulullah berkata kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun mesjid, ”Serahkanlah urusan pengadonan tanah kepada al Yamani sebab ia adalah orang yang paling ahli diantara kalian dalam hal membuat adonan tanah”. Dalam riwayat lain Al-Yamani sendiri menceritakan : “ Aku mengambil pengukur tanah kemudian mulai mencampurnya dan melihatnya Rasulullah sangat tertarik, pada saat itu juga beliau berkata, ” Biarkanlah Hanafi mengurus tanah, karena ia lebih cermat di bidang tanah dibanding kalian.” Sementara itu Baihaqi meriwayatkan, ”Tempatkanlah Yamani di bagian pengadonan tanah, karena dalam hal ini ia lebih baik daripada kalian.”<sup>45</sup>

### **c. Konsep Syuro ( Musyawarah)**

Musyawarah adalah suatu pendekatan cultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi dan identifikasi masalah. Musyawarah juga merupakan bentuk sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki atas keputusan dan rencana pembangunan. Musyawarah juga merupakan cara analisis kebutuhan (needs) tidak sekedar keinginan (wants) yang bersifat superfisial demi pemenuhan kebutuhan sesaat. ( Karsidi, 2001).

---

<sup>45</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah sebuah Studi analisis BERdasarkan sumber-Sumber Yang otentik ( Jakarta: Qisthi Press, 2006) hal. 354

Musyawarah adalah satu sifat dan karakter orang-orang beriman..Untuk menghasilkan keputusan musyawarah yang baik, hendaknya dilakukan dengan orang-orang terpilih.Jika musyawarah dengan orang yang tidak jelas identitasnya (*zhalim dan su'ul khuluk* ) maka produk musyawarah tentu tidak dapat dijadikan rujukan.<sup>46</sup> Senada dengan apa yang dikemukakan Karsisdi (2001) bahwa untuk mewakili sebagai peserta musyawarah untuk suatu keperluan seperti merumuskan kebutuhan masyarakat haruslah benar-benar yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.Musyawarah harus dipandang sebagai bentuk dari *community needs analysis*.

Kard Ali (1968) mengemukakan dalam Ahmad Ibrahim, bahwa Rasulullah membentuk majelis Syuro yang beranggotakan 14 orang dari para sahabat pilihan yakni para sahabat yang berpengetahuan luas dan tajam analisisnya, memiliki kelebihan intelektual, tingkat keimanan yang tinggi dan rajin mendakwahkan Islam. Anggota Majelis Syuro ini terdiri dari sahabat Muhajirin dan Anshor, diharapkan keputusan yang diambil bersifat komprehensif dan mengakomodir kepentingan semua golongan.<sup>47</sup>

Selanjutnya Kard Ali (1968) dalam Ahmad Ibrahim menyebutkan sahabat khulafa'urrahyidun juga menjalankan konsep Syuro dengan mencontoh Rasulullah SAW,Ketika Abu Bakar ra. Nebjabat sebagai khalifah beliau selalu bermustawarah dengan para ahli ilmu dan fiqh, beliau memanggil sahabat-sahabat

---

<sup>46</sup> Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari'ah dalam Praktek (Jakarta:Gema Insani,2003),Hal.123

<sup>47</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariat Sebuah Kajian Historis dn Kontemporer* ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hal 96

Nuhajirin dan Anshor, memanggil Umar ra., Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin tsabit. Semua sahabat ini member fatwa kepada masyarakat tentang kekhalifahan Abu Bakar ra.<sup>48</sup>

Dalam memutuskan persoalan yang besar Khalifah Umar ra., selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dan berkata : “pendapat satu orang seperti jahitan pakaian yang tipis, pendapat 2 orang akan memperkuat jahitan dan pendapat tiga orang dan lebih, tidak akan pernah rusak.” Dalam mesjid, khalifah juga sering meminta pendapat jamaah tentang satu persoalan. Beliau melontarkan pendapatnya dan pendapat kaum muslimin dalam satu majelis syuro, dimana majelis ini beranggotakan 14 orang sahabat, jika telah terdapat kesepakatan maka khalifah Umar akan menjalankannya.<sup>49</sup>

Dalam syuro terdapat kekuatan dan keterkaitan antara kaum muslimin syuro mendorong munculnya pemikiran kolektif, pemahaman bersama dan menguatkan rasa ukhuwah Islamiyah. Dalam Al-Qor'an Allah SWT berfirman :

**وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)**

*“dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Anfal : 46)*

Semua indikasi ini menguatkan bahwa konsepsi Syuro merupakan konsep dasar dalam manajemen islam. Ketika kaum muslimin sepakat atas suatu perkara, maka wajib dikuatkan, diiuti dan dilaksanakan tanpa ada pertentangan dan permusuhan terhadap keputusan musyawarah jama'ah.

<sup>48</sup> Ibid ,hal 97.

<sup>49</sup> Ibid hal 98

### 3. Pengawasan

Dalam pandangan islam pengawasan (control) dimaksudkan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak<sup>50</sup> Dalam Ibrahim (2006) Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan perfoma sebaik mungkin begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>51</sup>

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggungjawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerjanya dikontrol sesuai prosedur yang berlaku sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.

Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat mendasar yang dikenal dalam manajemen Islam, pertama ; pengawasan internal. Pengawasan yang berasal dari dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah. Seorang yang yakin bahwa Allah mengawasi setiap manusia, maka ia akan bertindak sangat hati-hati baik ketika sendiri, berdua maupun ditengah banyak orang, ini adalah control yang paling efektif yang berasal dari diri sendiri.\.

Pengawasan internal yang melekat pada diri setiap muslim akan menjauhkannya dari segala bentuk penyimpangan dan menuntunnya untuk konsisten kepada hukum Allah dalam setiap aktivitasnya akan tetapi mereka hanyalah manusia

---

<sup>50</sup> Abdul Mannan, Membangun Islam Kaffah, (Madinah Pustaka, 2000), hal 152

<sup>51</sup> Ahmad Ibrahim Abu sinn, Manajemen ....., hal 179

biasa yang sangat mungkin melakukan penyimpangan dan kecenderungan kepada hawa nafsu. Agar lebih efektif ada system control yang kedua yaitu *pengawasan eksternal* yang berasal dari luar diri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara instruksi dan pelaksanaannya, optimalisasi perencanaan yang sudah ada dan lain-lain.

Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian reward (imbalan) and punishment (hukuman)<sup>52</sup> Jika seseorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, maka karyawan tersebut sebaiknya diberi reward. Bentuk reward tidak mesti berupa materi, dapat pula berupa pujian, penghargaan bahkan promosi jabatan, beasiswa, dan lain-lain. Sedangkan seorang karyawan yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya bahkan hingga merugikan perusahaan sebaiknya diberi *punishment*. Bentuk punishment pun bermacam-macam, mulai dari teguran, peringatan, skors bahkan pemecatan. Namun Islam menggarisbawahi satu hal yang harus dipahami oleh seorang atasan/ pimpinan yakni bahwa pengawasan akan berjalan baik jika masing-masing manajer berusaha memberikan contoh terbaik kepada bawahannya.

## **C. KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ISLAM**

### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Islam**

---

<sup>52</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek (Jakarta, Gema Insani, 2003) Hal. 156*

Dalam pengertian yang paling dikenal secara luas dan sederhana bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang terhadap suatu kegiatan seperti Moeliono memberikan definisi singkat tentang partisipasi yang berarti berperanserta dalam suatu kegiatan.<sup>53</sup>

Dalam wacana pembangunan, Kikkelsen (1999) dalam Soetomo (2006) menginventarisir ada enam tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi. Pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua; partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi adalah proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Keempat, partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Kelima; partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Keenam; partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.<sup>54</sup>

Selain beberapa pengertian diatas, ada pengertian partisipasi yang lebih bersifat dorongan internal dari dalam diri partisipasi (masyarakat) dan juga adanya peluang dari penyelenggara pembangunan itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh

---

<sup>53</sup> Moelinono, A.M *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hal 978

<sup>54</sup> Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006/, hal. 84.

Slamet (1992) yakni partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi tiga faktor pendukungnya yaitu 1. Adanya kemauan, 2. Adanya kemampuan dan 3. Adanya kesempatan untuk berpartisipasi.<sup>55</sup>

Sedangkan Koentjoroningrat menggolongkan partisipasi masyarakat kedalam dua tipologi ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekwensi keikutsertaan masyarakat terhadap implemmentasi kebijakan, sedangkan partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.<sup>56</sup> Adapun Thoha dalam Indrafachrudi (1984), menggolongkan partisipasi masyarakat kedalam tiga kelompok yakni partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperanserta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, partisipasi *mobilisasi* dan partisipasi *ceremony*. Agar partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan baik, maka persiapkan anggota staf dengan pengetahuan tentang masyarakat, sejarahnya, tradisinya, kepercayaannya, kehidupan sosial ekonominya, bentuk pemerintahan, satuan-satuan komunikasi dalam masyarakat, kepemimpinan dan kesadaran berorganisasi masyarakat tersebut<sup>57</sup>.

Sebagaimana teori partisipasi dalam pembangunan berdasarkan model *People Centered development* (Korten, 1983) dalam strategi ini konsep partisipasi cukup member keuntungan karena :

---

<sup>55</sup> Slamet Santoso, *Supervisi Pembangunan Masyarakat*, (Bandung, PT. Enerco, 1992).

<sup>56</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1958), hal. 90

<sup>57</sup> Indrafachrudi Sukarto, *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang Tua Murid dan Masyarakat*, (Malang: IKIP Malang, 1994) Hal. 17

- 1.Mampu merangsang tumbuhnya swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting bagi pembaharuan.
- 2.Mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam pembangunan
- 3.Pelaksanaan pembangunan makin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
4. Jangkauan pembangunan menjadi lebih luas meskipun data terbatas.
5. Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>58</sup>

Dikenal ada dua pendekatan dalam pengembangan suatu lembaga yakni pendekatan dari atas ke bawah (top down strategy) dan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up strategy).<sup>59</sup> Dalam konteks partisipasi tentu saja pendekatan bottom up (dari bawah keatas) lebih tepat diterapkan. Pendekatan ini bertumpu pada kekuatan yang bersumber dari bawah yakni masyarakat sebagai komponen pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dituntut secara aktif menyumbangkan perannya dalam proses pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. Maka dalam konteks penyelenggaraan pendidikan,partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan anggota masyarakat (orang tua murid, masyarakat umum maupun masyarakat sekolah) dalam membantu dan bekerjasama untuk kesuksesan

---

<sup>58</sup> Zulkifli Muhadi,Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) dalam Perspektif Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat kabupaten Sumbawa Barat (Sebuah Kajian Fenomenologis),Disertasi,(malang;pascasarjana unmer Malang,2009), hal.9

<sup>59</sup> Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat,( Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2006),Hal.40

program sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Adapun masyarakat (community) adalah kelompok manusia yang saling terkait dengan sistem, adat istiadat, dan hukum yang berlaku<sup>60</sup> dalam pengertian lain yang hampir senada dikemukakan oleh Abdul Latif (2009) dalam bukunya *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, menyebutkan pengertian masyarakat sebagai sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan satu sama lain, pola hubungan antar individu dalam masyarakat pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan diabadikan dalam norma dan aturan yang umumnya tidak diverbalkan.

Dalam Al-Qor'an terminology masyarakat dikenal dalam berbagai istilah Pertama; qoum. Memiliki makna dasar yakni kelompok manusia, berdiri tegak atau tekad. secara leksikal qoum adalah kelompok manusia yang dihimpun oleh suatu hubungan atau ikatan yang mereka tegakkan ditempat kaum itu berada.

Qor'an menyebut istilah qoum sebanyak 383 kali dengan sifat dan konotasi yang berbeda-beda, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan term lain yang bermakna sama. Ada kata qoum yang menunjukkan sifat positif seperti kaum yang yakin (qaumun yaqinun), yang beriman (qaumun yu'minun) kaum yang saleh (Qaumun Al-halih) kaum yang bersyukur (qaumun Yasykurun), kaum yang ahli ibadah (qaumun Abidin). Adapun yang menunjukkan sifat negative seperti kaum yang menyimpang (qaumun ya'diluun), Kaum yang zalim (qaumun

---

<sup>60</sup> Zulfi Mubaroq, Sosiologi Agama, Tafsir Sosial Fenomena Multi religious kontemporer, (Malang : UIN press, 2006), Hal 5

Al-Zhalimun), kaum yang kapir (Qaumul Kafirun), kaum yang fasik (qaumul fasiqun), dan lain-lain. Juga ditujukan kepada semua kenis kelamin laki-laki maupun perempuan<sup>61</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata qaum adalah dialamatkan kepada kelompok manusia secara umum dengan bermacam-macam sifat dan ciri yang melekat padanya.

Kedua Ummat adalah bentuk tunggal dan kata umum. Secara memiliki makna tempat kembali, kelompok, agama, postor tubuh, masa dan tujuan (Ibnu Faris dalam nurdin, 2002), dari kata tersebut muncul kata umm (ibu) dan Imam (Pemimpin), terdapat hubungan makna antara keduanya menjadi teladan dan tumpuan masyarakat. Maka kata ummam mengandung pengertian, kelompok manusia yang berhimpun karena didorong oleh persamaan sifat, kepentingan dan cita-cita, agama, wilayah tertentu, dan waktu tertentu.<sup>62</sup>

Menurut Ali Syariati, dasar tatanan ummat adalah kesamaan akidah dan kesamaan dalam kepemimpinan yang satu agar individu-individunya bergerak menuju kiblat yang sama. Ini menjadi ciri khas ummat atau masyarakat Islam. Karena itu ummat adalah suatu istilah yang mengandung arti bergerak dan dinamis.

Dalam konteks sekolah atau madrasah, masyarakat adalah warga atau individu yang berada di sekolah atau madrasah dan disekitar madrasah yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung terhadap manajemen sekolah

---

<sup>61</sup> Ali Nurdin, Qur'anic Society Menelusuri Konsep Masyarakat ideal Dalam Al-Qor'an (Jakarta: Erlangga, 2002), Hal 57

<sup>62</sup> Ibid.

atau madrasah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap lembaga .Masyarakat pendidikan adalah segenap komponen yang terkait yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pendidikan., sehingga lazim muncul pernyataan tentang stake holder atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan tugas itu.<sup>63</sup>

Mencermati pengertian ummat dalam terminasi Al-Qor'an yang dikemukakan oleh Ali Syari'ati diatas, bahwa ummat (masyarakat) sesungguhnya melekat pada dirinya sifat dinamis (terus bergerak).

Setelah jelas pengertian antara partisipasi dan masyarakat ,maka partisipasi masyarakat menunjukkan pengertian : keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan,(united Nation,1975).Dalam kebijakan nasional saat ini,melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan merupakan konsekwensi logis dari implementasi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Cohen dan Uphof dalam Sahidu (1998), partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan,penerapan keputusan, penikmat hasil, dan evaluasi kegiatan.Secara lebih rinci partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan,member masukan berupa pemikiran,tenaga waktu, keahlian,modal dan materi, serta ikut memanfaatkan hasil-hasilnya.(Sahidu,1998).

---

<sup>63</sup> Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Jakarta : Rieneka cipta, 1977), 1997, hal 72

#### 4. Partisipasi Masyarakat Sebagai Sumber Daya Pendidikan.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, dipaparkan dengan jelas bahwa masyarakat adalah satu sumber daya pendidikan, pasal 4 ayat 6 berbunyi : *“Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”*<sup>64</sup>, kemudian dijabarkan dalam hamper setiap pasal tentang peran dan fungsi yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahkan dalam Bab XV khusus membahas peranserta masyarakat dengan segala ketentuannya yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Demikian strategisnya peran masyarakat dalam hal ini, bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum, masyarakat terorganisir maupun orang tua murid, bersama-sama menjalankan fungsi dan peran yang diamanatkan UU tersebut untuk tetap menjalin hubungan yang erat secara efektif dan efisien guna menunjang program pengembangan pendidikan di sekolah.

Ada satu model yang memperlihatkan hubungan yang efektif antara sekolah dengan masyarakat yang dikemukakan oleh Bowles dan Fruth (1976) dalam Wahjosumijo, untuk dijadikan satu produk proses analisis, komunikasi, keterlibatan dan penyelesaian isu-isu oleh pembuat kebijakan dan administrator sekolah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Analisis adalah suatu proses dimana isu-isu dari anggota masyarakat diidentifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain.

---

<sup>64</sup> UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Jakarta:Asa Mandiri,2008)

- b. Komunikasi, proses interaksi antara sesama anggota masyarakat dan antar sekolah dengan anggota masyarakat.
- c. Keterlibatan (involmen), melalui proses tersebut anggota masyarakat memberikan kontribusi wahid, energy, keahlian dan sumber-sumber lain terhadap sekolah dan memperoleh jalan (akses) untuk proses pembuatan keputusan tentang sekolah.
- d. Penyelesaian (solution), proses yang direncanakan untuk memecahkan persoalan dan untuk mengurangi konflik actual dan potensial diantara keluarga, sekolah dan masyarakat.<sup>65</sup>.

Selanjutnya dalam upaya membangun motivasi untuk berpartisipasi, banyak teori mengatakan bahwa jika manusia telah terpenuhi kebutuhannya maka motivasi untuk berbuat akan lahir dengan sendirinya. Maslow telah membagi kebutuhan manusia dalam lima tingkatan, yaitu :

- a. Kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan biologis seperti makan, minum, seks, air dan kebutuhan untuk beristirahat.
- b. Kebutuhan rasa aman, seperti terlepas dari ancaman, terlepas dari bahaya, hidup stabil, penuh rasa aman dan terhindar dari penderitaan.
- c. Kebutuhan sosial seperti kebutuhan kasih sayang, cinta, afiliasi, penerimaan dan rasa memiliki serta dimiliki.

---

<sup>65</sup> Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal 338.

d. Kebutuhan harga diri seperti kebutuhan akan pengakuan, kedudukan, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk diakui kemampuannya, dan kebutuhan untuk diakui kesuksesannya<sup>66</sup>.

Keterkaitannya dengan konsep partisipasi, ada banyak kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Dengan pendidikan masyarakat akan merasa terpenuhi kebutuhan intelektualnya, terpenuhi pula kebutuhan sosialnya, kebutuhan harga dirinya dan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya, dengan begitu masyarakat menjadi puas sebagai pelanggan pendidikan sehingga motivasi itu akan tumbuh dengan sendirinya dan tidak sulit untuk digerakkan mengingat bahwa sesuatu yang mereka butuhkan dapat dipenuhi oleh sekolah dengan tetap menjaga kualitas kelulusan yang siap pakai dalam pengertian bahwa peserta didik yang telah lulus dari bangku sekolah siap terjun dan hidup di tengah masyarakat dengan wajar dan baik.

Menurut hemat penulis hal ini sejalan dengan visi sekolah keagamaan yang berkonsentrasi pada kesiapan peserta didik hidup di tengah masyarakat yang sarat dengan persoalan kemasyarakatan yang membutuhkan jawaban berdasarkan konteks keagamaan baik secara teori maupun praktek. Demikian salah satu penyebab kecenderungan masyarakat memilih sekolah keagamaan tidak lain karena sekolah keagamaan di asumsikan sebagai lembaga yang memiliki kelengkapan ilmu pengetahuan baik dunia maupun akhirat dan lembaga ini justru dianggap dekat dan harus proaktif menjalin komunikasi intensif dengan

---

<sup>66</sup> Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal 249

masyarakat dan menjangkit sebesar-besarnya partisipasi masyarakat, ketika semakin banyak orang tua atau konsumen yang merasakan kepuasan itu, makin banyak dan besar pula partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Komitmen partisipasi inilah yang harus dipelihara dan dikembangkan oleh manajemen sekolah agar tetap menjadi sumberdaya dan energi positif bagi kemajuan pendidikan.

#### 5.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya dalam program sekolah ada lima prinsip yang harus diperhatikan oleh komite sekolah atau majlis madrasah sebagaimana dikemukakan oleh Maisyaroh (2000) sebagai berikut :

##### a.Fleksibilitas

Lembaga mempunyai program-program yang cukup lentur dan beradaptasi secara terus menerus dengan perubahan-perubahan layanan lembaga lain yang ada di masyarakat.

##### b.Relevansi

Peran dan fungsi dari lembaga pendidikan hendaknya sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang peserta didik.

##### c.Partisipasi

Lembaga pendidikan melibatkan masyarakat dalam mengembangkan program kegiatan dan layanan guna memperluas, memperbaharui dan memadukan berbagai pengalaman

d. Komprehensif

Lembaga pendidikan senantiasa menghubungkan dirinya dengan masyarakat yang lebih luas, intern bangsa maupun secara Internasional

e. Melebaga

Lembaga pendidikan harus senantiasa dikelola secara baik, sehingga mampu menunjukkan keberhasilan karena pada umumnya partisipasi masyarakat akan muncul bila lembaga pendidikan tersebut mampu menunjukkan eksistensinya dan keberhasilannya.

Pada dasarnya keterlibatan atau partisipasi orang tua dan masyarakat dalam sekolah setidaknya dilandasi oleh tiga alasan sebagaimana yang Dikemukakan oleh Gorton dalam Julianto (2003 ), yakni :

- a. Melalui partisipasi orang tua dan masyarakat akan menjadi lebih mengenal apa yang dipelajari murid-murid di sekolah, lebih memahami problematika yang dihadapi sekolah, lebih mendorong upaya untuk memajukan program pendidikan.
- b. Melalui partisipasi orang tua dan masyarakat sekolah akan menerima ide-ide sumber daya manusia yang akan memajukan pendidikan.

- c. Melalui partisipasi orang tua dan masyarakat akan lebih mudah untuk mengevaluasi sekolah secara terbuka dan efektif.

#### 6. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan anggota masyarakat dalam membantu dan bekerjasama dengan sekolah sehingga program sekolah dapat berjalan dengan lancar dan lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Ahmad, 1994)

Made pidarta (2004) menyebutkan beberapa wadah partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain :

- a. Dewan Pendidikan
- b. Komite Sekolah
- c. Persatuan Orang Tua Siswa.
- d. Perkumpulan Olah Raga
- e. Perkumpulan Kesenian
- f. Organisasi lain

Sedangkan bidang partisipasi antara lain :

- a. Kurikulum lokal
- b. Alat-alat belajar
- c. Dana

- d. Material atau bahan bangunan
- e. Auditing keuangan
- f. kontrol kegiatan sekolah
- g. Dan sejenisnya.

Adapun cara berpartisipasi

- a. Ikut dalam pertemuan
- b. Datang ke sekolah
- c. Lewat Sekolah
- d. Lewat telepon
- e. Ikut malam seni
- f. Ikut bazaar
- g. Dan sejenisnya.

Menurut penelitim Muhsin (2004),bahwa jenis partisipasi yang disumbangkan masyarakat sangat beragam, seperti :

- a.Partisipasi material bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi
- b.Partisipasi pemikiran bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan pendidikan.

- c. Partisipasi tenaga/ fisik bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan pemikiran tetapi memiliki kepedulian dalam membantu madrasah.
- d. Partisipasi moral dalam bentuk dukungan penuh oleh berbagai lapisan masyarakat dalam memotivasi perjuangan Agama Islam.

Ukuran partisipasi masyarakat menurut Fattah (2004) diukur dengan partisipasi masyarakat menanggung biaya sekolah baik yang masuk kategori bantuan pembangunan yang populer dengan istilah dana sumbangan pendidikan (DSP) maupun iuran bulanan peserta didik. Partisipasi yang berlaku universal adalah kerjasama yang erat antara perencanaan di sekolah dengan masyarakat sekitar struksiekolah dalam menyusun rencana strategis, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan kualitas sekolah. Kerangka merekonstruksi menurut Uphoff (1997). Mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan dan lingkungan. Partisipasi berkembang menjadi 1) partisipasi adalah mengambil kebijakan dalam mengambil keputusan 2) partisipasi dalam melaksanakan 3) partisipasi memperoleh keuntungan dan 4) partisipasi dalam mengevaluasi.

### C. KONSEP PENDIDIKAN DALAM ISLAM

Secara substansi sesungguhnya antara pendidikan Islam dengan Pendidikan Agama Islam adalah berbeda. Walaupun pada banyak kalangan masih memiliki pemahaman yang rancu terhadap keduanya. Ketika seorang berbicara tentang pendidikan Islam, ternyata isinya terbatas pada pendidikan Agama Islam yang menjadi mata ajar di sekolah atau madrasah. Padahal menurut Muhaimin

(2006), pendidikan agama islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam yang dapat difahami dalam beberapa perspektif, yakni : 1. sistem pendidikan Islam ialah pendidikan yang difahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran nilai fundamental yang bersumber dari al-Qor'an dan Hadis, 2. Pendidikan agama islam atau pendidikan keislaman adalah upaya mendidikan agama islam atau ajaran Islam agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang (way of life) 3. Pendidikan dalam islam yakni praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah ummat islam yang tumbuh dan berkembangnya sebagai agama, ajaran, maupun sistem budaya dan peradaban sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Pendidikan islam dalam hal ini difahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan nilai agama.<sup>67</sup>

Haidar (2009) merumuskan bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rokhaniah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah dan manusia dengan alam semesta.<sup>68</sup>

Dalam hal ini Haidar membagi konsep pendidikan Islam dalam dua perspektif, pertama: Pendidikan Islam dalam konteks lembaga seperti: Pendidikan Islam dalam keluarga (informal). Pendidikan Islam dalam masyarakat (nonformal) dan Pendidikan Islam yang diajarkan di sekolah (formal) yang diselenggarakan

---

<sup>67</sup> Muhaemin, Nuansa baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) Hal. 6

<sup>68</sup> Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan islam Di Indonesia, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), hal 6

setiap jenis dan jenjangnya. Kedua ; Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sebagai mata pelajaran wajib dan diterapkan di seluruh Indonesia.

Dari pandangan kedua pakar diatas, konsep pendidikan islam dalam konteks penelitian ini adalah menyangkut konsep Pendidikan Islam baik dilihat sebagai sebuah ajaran nilai, sikap, dan pandangan hidup, maupun sebagai bidang studi wajib. Dalam hal ini masyarakat menjadi bagian dari manajemen sekolah dan sekolah adalah bagian dari masyarakat.

Berbicara dalam konteks partisipasi masyarakat dalam lembaga pendidikan, ada semacam sistem kerjasama timbale balik antara dua lembaga tersebut dalam mengemban tanggungjawab yang sama besarnya, dalam upaya secara bersama-sama menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam dalam pribadi siswa sebagai anggota keluarga, dan siswa sebagai peserta didik di sekolah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kompetensi keislaman secara konseptual maupun kompetensi keislaman secara actual, mengingat bahwa tujuan pendidikan secara nasional pun menghendaki berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

**E.MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Termasuk diantara beberapa Manajemen Komponen Penyempurnaan Pendidikan Islam menurut Mujammil Qomar (2007) adalah manajemen masyarakat Pendidikan Islam yang mengelola sumber daya masyarakat sebagai pemilik kontribusi terhadap lembaga Pendidikan Islam .Disamping itu beberapa komponen penyempurnaan lainnya seperti: Manajemen layanan pendidikan Islam, Manajemen Mutu pendidikan Islam, manajemen perubahan pendidikan Islam,Manajemen struktur Pendidikan Islam .Manajemen Konflik Pendidikan Islam dan Manajemen Komunikasi Pendidikan Islam.Adapun yang termasuk dalam manajemen Komponen Dasar pendidikan Islam terdiri dari: Manajemen SDM,Manajemen kesiswaan,Manajemen kurikulum, manajemen keuangan dan manajemen sarana-prasarana Pendidikan Islam.

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap kemajuan lembaga pendidikan Islam kiranya hal ini perlu mendapat perhatian secara manajerial. Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting,karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam menjadi salah satu kunci kemajuan lembaga tersebut.<sup>69</sup>

E.Mulyasa (2002), menyebutkan model manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan sekolah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh disertai pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan secara simpati dari masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan sekolah.

---

<sup>69</sup> Mujammal Qomar,*Manajemen Pendidikan Islam*,( Erlangga,Surabaya,2007) hal 181

Adapun hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain :

1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak.
2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat.
3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.<sup>70</sup>

Mujammil Qomar (2007) menambahkan, ada hubungan sekolah dengan masyarakat yang lebih esensial selain yang tersebut diatas yakni :

1. Untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh lembaga.
2. Untuk menunjukkan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi.
3. Untuk mendapatkan dukungan riil dari masyarakat terhadap kelangsungan lembaga pendidikan.<sup>71</sup>

Dalam menjaga hubungan tersebut perlu dijalin komunikasi yang insentif dalam bentuk kerjasama. Emery Stop yang dikutip Mujammil Qomar (2007) menyebutkan dalam bekerjasama sebaiknya memenuhi syarat jujur, mulia,

---

<sup>70</sup> E. Mulyasa, Manajemen berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal 50

<sup>71</sup> Mujammil Qomar, Manajemen ...., hal 184

mencakup segala hal yang dibutuhkan, komprehensif, sensitive terhadap masyarakat dan dapat dipahami oleh pihak yang lain.<sup>72</sup>

Adapun cara yang dapat ditempuh yakni dengan melakukan sosialisasi secara realistis argumentative kepada masyarakat tentang program-program ideal yang telah dilakukan.<sup>73</sup> Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat diharapkan terwujud.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa gagasan, ide, kritik, saran, dukungan serta pelaksanaan pendidikan.<sup>74</sup> Selanjutnya menurut E Mulyasa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menggalang partisipasi masyarakat :

1. Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar nasional, dan keagamaan serta pentas seni.
2. Mengidentifikasi tokoh masyarakat yakni orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya.
3. Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minat mereka.

---

<sup>72</sup> Ibid, hal 185

<sup>73</sup> Ibid hal 186

<sup>74</sup> E.Mulyasa, Manajemen..., hal 170

4. Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.<sup>75</sup>

Disamping pendekatan tersebut terdapat cara-cara lain dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, James J. Jones dalam Mujammil Qomar (2007) menawarkan lima cara yakni :

1. Melalui aktivitas para siswa kurikuler
2. Melalui aktivitas para pengajar
3. Melalui kegiatan ekstrakurikuler
4. Melalui kunjungan masyarakat atau para orang tua ke lembaga pendidikan.
5. Melalui media massa.<sup>76</sup>

Sedangkan dalam panduan manajemen sekolah disebutkan cara untuk berhubungan dengan masyarakat :

1. Melaksanakan program *kemasyarakatan* seperti kebersihan lingkungan.
2. Mengadakan *open house* yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah.
3. Menerbitkan bulletin sekolah, majalah, atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah untuk diinformasikan kepada masyarakat.

---

<sup>75</sup> Ibid, hal.173-174

<sup>76</sup> Mujammal Qomar, Manajemen..... Hal 187

4. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau Pembina suatu program sekolah.
5. Membuat program kerjasama sekolah dengan masyarakat misalnya perayaan hari besar nasional dan keagamaan<sup>77</sup>

Untuk melaksanakan manajemen masyarakat Mujammil Qomar menawarkan untuk menempuh strategi berlapis dari yang bersifat usaha internal maupun eksternal. Strategi tersebut meliputi :

1. Membangun citra (image building) yang baik pada Lembaga Pendidikan Islam dengan kejujuran, amanat, dan transparansi pengelolaan terutama kemampuan membuktikan wujud nyata hasil pendanaan yang diterima dari Negara maupun masyarakat.
2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam dengan menunjukkan prestasi akademik dan prestasi non akademik kepada masyarakat luas, berupa nilai raport, ijazah, NEM, Nilai cerdas cermat, nilai olimpiade, nilai lomba karya ilmiah, sementara prestasi non akademik bias berupa prestasi kejuaraan olah raga, UKS, Pramuka dan lain-lain.
3. Mensosialisasikan dan mempublikasikan kelebihan-kelebihan lembaga pendidikan Islam kepada masyarakat luas terutama yang sesuai dengan selera masyarakat.

---

<sup>77</sup> Panduan Manajemen Sekolah, (<http://Departemen Pendidikan dan kebudayaan.Direktorat J enderal pendidikan Dasar dan Menengah.Direktorat Pendidikan Umum,1998>), hal 151

4. Mengundang masyarakat luas untuk berkunjung ke dalam lembaga pendidikan Islam baik saat menerima raport, perayaan hari besar nasional dan keagamaan, maupun acara khusus orang-orang tertentu untuk membina sekolah.
5. Mengunjungi tokoh masyarakat dan melibatkan diri dalam acara atau kegiatan di tengah masyarakat.<sup>78</sup>

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian tentang Manajemen Partisipasi masyarakat dalam proram Pendidikan Islam ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis multisitus. Pendekatan *kualitatif (qualitative research)* menurut Schatzman dan Strauss yang dikutip oleh Sugiyono (2006), adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang kenyataan social melalui proses

---

<sup>78</sup> Mujammil Qamar, Manajemen ..... hal 192.

berfikir induktif dimana ada keterlibatan peneliti dalam situasi dan fenomena yang diteliti<sup>79</sup>

Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan : pertama; proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data, kedua ; analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabelm ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubunganm Kelima ; analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.<sup>80</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor dalam J.Moleong bahwa metode kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh.tujuan penelitian kualitatif adalah mencari dan memperoleh informasi mendalam dibandingkan dengan luas atau banyaknya informasi.<sup>81</sup>

Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) Menggunakan makna.konteks, dan *perspektif Emik* , 2) Proses penelitian lebih

---

<sup>79</sup> Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi, (Bandung, Alfabeta,2006), hal 17

<sup>80</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revis I, Bandung, Remaja Rosdakarya,2009), hal 10

<sup>81</sup> Moleong,L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung ,PT Remaja Rosdakarya,1996),hal 23.

berbentuk siklus daripada linier (pengumpulan dan analisa data berlangsung simultan 3) lebih mengutamakan kedalaman daripada keluasan cakupan penelitian, 4) Observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam proses pengumpulan data dan 5) peneliti sendiri merupakan instrument utama.<sup>82</sup>

## B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di MI Nurul Huda Desa Kayu Bawang dan MI At-Thayyibah Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Berdasarkan studi permulaan yang dilakukan peneliti melalui telah dokumen dan beberapa pihak terkait, merupakan pertimbangan mendasar mengapa peneliti memilih sekolah MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut ini, karena memiliki tingkat kemajuan yang nyata dibidang prestasi akademis dan non akademis bila dibandingkan sekolah setingkatnya di Kecamatan Gambut

Adapun pertimbangan tersebut antara lain :

- a. Peneliti melihat banyak kemajuan yang diraih oleh MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut dibandingkan sekolah lainnya di Kec. Gambut, baik dari segi akademis maupun non akademis.
- b. Lulusan MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut selalu menepati rating teratas dan berhasil menembus SMP dan MTs favorit di wilayah Kabupaten Banjar.

---

<sup>82</sup> Ibid,hal.55

- c. Mengalami peningkatan jumlah murid yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu ada kaitannya dengan persepsi yang semakin baik di mata masyarakat terhadap sekolah.
- d. Pihak sekolah khususnya siswa selalu terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, terutama pada hari-hari besar agama, hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengembangan pendidikan baik dalam *written curriculum*, *ekstrakurikuler* maupun *hidden curriculum*, yang kemudian menjadi alasan terjadinya partisipasi masyarakat.
- e. Lokasi yang cukup strategis, mudah diakses oleh lembaga pemerintah, mudah terjangkau arus transportasi dan sumber-sumber informasi lainnya dan tentunya dekat dengan pemukiman penduduk.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, sekolah ini berupaya mencerdaskan putra-putri Gambut. Sampai hari ini telah terjadi perkembangan yang signifikan. Lulusan sekolah ini selalu dapat menemus SMP dan MTs favorit dan menempati rating teratas pada SMP yang ada di wilayah Kabupaten Banjar.

### C. DATA DAN SUMBER DATA

Data dan informasi dapat berupa manusia maupun non manusia (Faisal, 1990, hal 17). Sumber data berupa manusia dapat diperoleh dari *kepala sekolah*, *bagian humas*, *guru-guru agama dan guru umum dan siswa* serta yang paling utama adalah *orang tua sebagai anggota masyarakat*.

Menurut Lofland (1984) yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>83</sup>

Senada dengan hal Sanapiah Faisal (1999), mengemukakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ucapan-ucapan, ujaran-ujaran, ungkapan-ungkapan, kesaksian-kesaksian, dan tindakan-tindakan dari subjek yang diteliti.

Sumber data utama adalah hasil wawancara mendalam dan observasi yang dicatat atau direkam dengan baik. Sedangkan *data-data sekunder* hanya menjadi penunjang saja misalnya *dokumentasi* dan lain-lain.<sup>84</sup>

Mencermati kedua definisi diatas, maka sumber data utama dalam penelitian ini adalah berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang akan diwawancarai dengan cara mencatat atau merekam serta mengambil gambar, video dan lain-lain.

Walaupun dikatakan bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, namun hal itu tidak bias diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Adapun foto menurut Bogdan dan biklen yang dikutip oleh Moleong, sudah banyak dipakai dalam penelitian kualitatif. Foto menghasilkan data

---

<sup>83</sup> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung. Rosdakarya 2009), hal 159.

<sup>84</sup> Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Aplikasi (Malang Yayasan Asah Asih Asuh 1999), hal 161

deskriptif dan hasilnya sering digunakan untuk menela'ah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua katagori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif yakni foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.<sup>85</sup>

Beberapa data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah :

1. Data tentang konsep manajemen sekolah dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap pengembangan program Pendidikan Islam di MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah
2. Data tentang kendala-kendala sekolah dalam menggalang partisipasi masyarakat terhadap program Pendidikan Islam.

86

3. Data tentang motivasi masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program Pendidikan Islam di MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut.
4. Data kesan guru tentang penerapan Manajemen Partisipasi Masyarakat di MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
5. Data pandangan siswa tentang penerapan Manajemen Partisipasi Masyarakat di MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut.

---

<sup>85</sup> Lexy Moleong, *Metodologi.....*, Hal 161

#### D. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Dalam pengumpulan data, peneliti menentukan beberapa informan berdasarkan criteria yang dikemukakan Spradley yang dikutip oleh Arifin Imron (1996), sebagai berikut:

1) Subyek yang cukup lama dan intensif menyatu dengan medan *aktivitas* yang menjadi sasaran penelitian, 2) subyek yang masih *aktif* terlibat dilingkungan *aktivitas* yang menjadidi sasaran penelitian, 3) subyek yang masih banyak memiliki waktu untuk dimintai informasi tetapi *relative* member informasi yang sebenarnya, 4) subyek yang tidak mengemas informasi yang sebenarnya, 5) subyek yang tergolong asing bagi peneliti sehingga terkesan seperti “*guru baru*”

87

Adapun informan-informan yang memenuhi criteria di atas adalah:

- a. Mantan Kepala MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
- b. Kepala sekolah MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
- c. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di sekitar madrasah
- d. Humas MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
- e. Ketua Komite MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
- f. Orang tua siswa MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut

---

<sup>87</sup> Arifin Imron, PPenelitian kualitatif dalam Pendidikan dan keagamaan ( Malang Kalimasahadah Press,1996) Hal 27

- g. Guru-guru agama dan guru umum MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
- h. Siswa-siswa MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut

Alasan ditetapkannya informan tersebut pertama; mereka sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan di MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut. kedua; mereka mengetahui secara langsung persoalan yang akan dikaji, ketiga; mereka lebih menguasai informasi secara akurat berkenaan dengan masalah yang terjadi di MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut.

Dalam pemilihan informan akan digunakan teknik *purposive sampling*, yakni penunjukan atas beberapa orang sebagai informan. Menurut Sitorus, Purposive Sampling atau sampling bertujuan, adalah bahwa sample yang diambil harus memiliki sifat tertentu yang sesuai dengan maksud penelitian, dan sifat-sifat sample itu dapat diterima mewakili sifat-sifat populasinya.<sup>88</sup>

Louis Cohen mengatakan : “*In purposiv sampling, reearchers handpick that cases to be included in the sample on the nasis of their judgement of their typicality. In this way, they build up a sample that is satisfacto*” Pada purposive sampling, para peneliti menangani kasus mereka dengan memasukan ke dalam semple sebagai dasar dugaan, asumsi sementara atau keputusan. Pada cara ini mereka membuat sample yang memenuhi kebutuhan tertentu dengan memuaskan.

---

<sup>88</sup> J.Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung:Tarsito,1985),hal 80

Selanjutnya untuk memilih dan menentukan informan dalam penelitian ini digunakan *snowball sampling* yakni kembali mengutip pernyataan Louis Cohen, “...*Recearches identify a small number of individuals who have the characteristics that they require. These people are then use as informants to identify others who qualify for inclusion and these, in turn, identify yet others.*”<sup>89</sup>

...Peneliti mengidentifikasi nomer kecil dari beberapa individu yang mempunyai karakteristik yang mereka butuhkan. Orang-orang tersebut kemudian digunakan sebagai informan/sumber informasi untuk mengidentifikasi beberapa hal yang sesuai dengan tema/judul penelitian mereka, kemudian/selanjutnya mengidentifikasi yang lain.

Selanjutnya menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong (1989), guna memburu informasi yang *observasi* menggunakan *teknik sampling bola salju (snowball sampling technique)*,<sup>90</sup> lebih jauh ditekankan oleh Margareth Mead dan Rodha Metraux dalam Djam’an Satori dan Aan Komariah (2009), bahwa sample dalaam penelitian kualitatif keshahihannya tidak tergantung pada jumlah kasus melainkan tergantung pada *spesifikasi* yang benar mengenai informan sehingga ia dapat diberi tempat yang tepat yang lazim disebut “*key persons*”<sup>91</sup>

## E. INSTRUMEN PENELITIAN

---

<sup>89</sup> Ibid hal 89

<sup>90</sup> L.J. *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), Hal 23.

<sup>91</sup> Djam’am Satori dan Aan Komariah, *metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung Alfabeta, 2009), hal. 105

Peneliti selaku *instrument utama* penelitian, (*the researcher is the key instrument*) hendaknya memenuhi *kevalidan* data.

Spradley dalam Sugiono (2006), menyatakan *validasi* terhadap peneliti ini menyangkut pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap subyek yang diteliti, kesiapan peneliti dalam memasuki kancan penelitian dimana *validasi* tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri melalui *evaluasi diri*. Selanjutnya ditegaskan bahwa dalam proses evaluasi diri, peneliti memposisikan diri sebagai *human interest* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan penelitian sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, membuat kesimpulan atas temuan. Disamping *instrument utama* peneliti juga menggunakan *instrument penunjang* seperti tape recorder, tustel, kamera, perekam, format-format desain penelitian, dan tulis menulis.<sup>92</sup>

Dalam pengumpulan data, peneliti berperan sebagai *instrument utama* dengan dibantu oleh *instrument-instrumen non manusia* walaupun sifatnya sangat terbatas. Nasution (1998), menyebutkan bahwa dalam menghadapi *konstruk* seperti ini manusia merupakan satu-satunya pilihan yang tepat untuk difungsikan sebagai *instrument utama* karena memiliki daya yang memadai guna memburu informasi kualitatif.<sup>93</sup> Orang sebagai *instrument* memiliki senjata dapat memutuskan secara *pleksible* ia senantiasa dapat menilai keadaan dan dapat

---

<sup>92</sup> Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996) hal.31

<sup>93</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), Hal 21.

mengambil keputusan.<sup>94</sup> Namun demikian peneliti harus tetap menjaga *obyektifitasnya* dalam melakukan penelitian.

## **F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data adalah *episode* terpenting dalam penelitian. Data yang valid dan lengkap sangat meanentukan kualitas penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

### **1) Observasi Peran Serta (*Participant Observation*)**

Peneliti melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang yang sedang diteliti, dengan cara ini peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, tajam bahkan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang muncul. Digunakannya teknik ini karena menurut Sanafiah Faisal, bahwa yang diteliti dalam hal ini adalah tingkah laku manusia dimana teknik ini akan lebih efektif dan lebih sesuai, tentu saja dilakukan dengan berpedoman pada arh yang spesifik, sistematis, terfokus dan direkam dengan cermat untuk dapat diuji akurasi dan validitas serta reliabilitasnya.<sup>95</sup>

Susan stainback (1998) dalam Sugiyono menyatakan, “*in participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities*”, dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati

---

<sup>94</sup> Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Rosdakarya, 1996) hal 17.

<sup>95</sup> Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya : Usaha Nasional, 1982). Hal 206.

apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.<sup>96</sup>

Margono (2005) yang dikutip dari Dham'an Satori dan Aan Komariah, mengungkapkan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>97</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian tentang manajemen partisipasi masyarakat dalam program pendidikan Islam ini, penelitian melakukan pengamatan berperan serta maupun sebagai pengamat penuh (Moleong, 2009, hal.177), terhadap beberapa aktivitas masyarakat atau orang tua murid dalam rapat-rapat (musyawarah) yang diadakan oleh sekolah atau lembaga komite sekolah, atau kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat secara umum.

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi, berikut ini adalah contoh pedoman observasi yang akan digunakan dalam penelitian dikutip dari Djam'an Satori dan Aan Komariah (2009).

### **Contoh Pedoman Observasi**

1. Fokus Observasi : Manajemen Komite Sekolah
2. Kategori : Rapat Komite Sekolah
3. Sub Kategori : Prosedur Rapat

---

<sup>96</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2009). Hal 311.

<sup>97</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2009) Hal 105.

4. Waktu Observasi : .....,.....,.....
5. Tempat Observasi : Ruang Rapat MI Nurul Huda dan MI At-Thayyibah Kecamatan Gambut
6. Orang yang terlibat : Ketua Komite, Kepala Sekolah, Orang tua Murid, Guru, dan Orang Tua murid.

<b>Aspek Kegiatan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Makna</b>
Organisasi rapat		
Persiapan		
Pembukaan		
Kegiatan inti		
Penutup		

Selain observasi yang dilakukan dengan pedoman diatas, peneliti juga melakukan observasi tak berstruktur yang berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan instrument observasi secara sistematis dari awal hanya berupa rambu-rambu pengamatan, karena peneliti belum tahu pasti apa yang akan terjadi, jenis data apa yang akan berkembang dengan cara apa data baru itu paling sesuai untuk dieksplorasi.<sup>98</sup> Observasi ini dilakukan untuk mengamati suasana sekolah, kegiatan-kegiatan siswa dan lain-lain.

## 2). Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Esterberg (2002) dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah mendefinisikan interview sebagai berikut : *“a meeting of two persons to exchange information and idea through questions and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about particular topic.”* Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksukan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>99</sup>

Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa sedikit banyak wawancara atau interview merupakan angket lisan, antara responden dan interview mengemukakan informasinya secara lisan dalam hubungan tatap muka, jadi responden tidak perlu menulis jawabannya.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Ibid, Hal 120.

<sup>99</sup> Ibid ,hal 317

<sup>100</sup> Ibid hal 134

Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang informasi yang berkaitan dengan orang dan persoalan yang sedang diteliti. Adapun jawaban dari hasil wawancara mendalam ini kemudian disimpan dalam bentuk tulisan. Sedangkan jadwal wawancara tidak dicantumkan dalam proposal ini sebab sifatnya *tentative* disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

No.	Kategori	Pertanyaan
1.	Materi	1. Dalam mendukung program sekolah apa saja yang sudah disumbangkan orang tua murid atau masyarakat umum yang bersifat materi ?
2.	Non Materi	2. Selain sumbangan dalam bentuk materi, apakah partisipasi dalam bentuk sumbang saran atau ide juga ada ?

3.	Pendapat	3. Menurut Bapak, apakah partisipasi masyarakat selama ini terhadap sekolah sudah cukup maksimal ?
----	----------	--

Untuk lebih luasnya peneliti dalam menggali informasi dari informan tentang berbagai data yang diperlukan namun tetap mengacu kepada tujuan pencarian data, maka penelitian akan menggunakan wawancara semistruktur (*semistructured interview*) yang menggunakan inti-inti atau pokok pembicaraan. Namun dalam pelaksanaannya interviewer mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan tidak perlu di tanyakan secara berurutan, tetapi dapat *dimodifikasi* saat wawancara berlangsung. Wawancara ini juga termasuk jenis wawancara mendalam (*in-dept interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Adapun contoh pedoman wawancara yang digunakan adalah :

### **Contoh Pedoman Wawancara**

Fokus Wawancara : Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

Informan : Kepala MI Nurul Huda, dan MI At-Thayyibah  
Kecamatan Gambut

Waktu Wawancara : .....,.....

Tempat Wawancara : .....,.....

### 3) Dokumentasi (*documentation*)

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (*non human resources*), Nasution (2003) menyebutkan: ...”adapula sumber non manusia (*non human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.

101

Teknik ini penting digunakan karena dari informasi yang ada dapat di analisis lebih dalam sebagai mana yang ada dalam dokumen. Karena “banyak informasi yang kare sifatnya sudah ada tapi tersimpan dalam dokumen, sehingga untuk mengenalinya membutuhkan upaya menganalisa dokumen.”<sup>102</sup>

Demi kepentingan penelitian, orang membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan mungkin juga menjadi pendukung suatu kebenaran.

Studi *dokumen* dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih *kreadibel*/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait

---

<sup>101</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Transito, 2003) Hal 85.

<sup>102</sup> Djunaidi Ghony, *Penelitian Tindakan Kelas* (Malang : UIN Malang Press, 2008) Hal 93.

dengan fokus penelitian. Dalam penelitian tentang *Manajemen Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pendidikan Islam* ini, peneliti akan menghimpun dokumen-dokumen mengenai berbagai kegiatan dan momentum atau program-program sekolah yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## **G. ANALISA DATA**

Analisis data akan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution (2008), analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>103</sup>

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan berikutnya sampai tahap tertentu, sampai diperoleh data yang dianggap *kredibel*. Miles and Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiono (2009), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>104</sup>

Untuk membantu dan memudahkan peneliti dalam meneliti, Hamidi (2008) menyarankan empat langkah praktis dalam Teknik analisa data, yaitu :

1. Membuat catatan lapangan (*field recording*)
2. Membuat catatan penelitian (*research recording*)

---

<sup>103</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan KUantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), Hal. 336.

<sup>104</sup> Ibid, Hal. 336.

3. Mengelompokkan data sejenis (*grouping*)
4. Menginterpretasikan data (*interpretation*)<sup>105</sup>

#### H. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA

Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan keadaan sebenarnya. Hal ini bias dipengaruhi oleh kredibilitas informan, waktu pengungkapannya, kondisi yang dialami dan sebagainya. Karenanya peneliti perlu melakukan *Trangulasi* yakni pengecekan data dari berbagai sumber yakni hasil pengamatan (*observasi*) dikonfirmasi lagi melalui wawancara kepada informan kemudian dipastikan pula dengan dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Untuk mendapatkan kepercayaan hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Djam'an Satori dan Aan Komariah (2009), yakni :

##### 1. Triangulasi Sumber

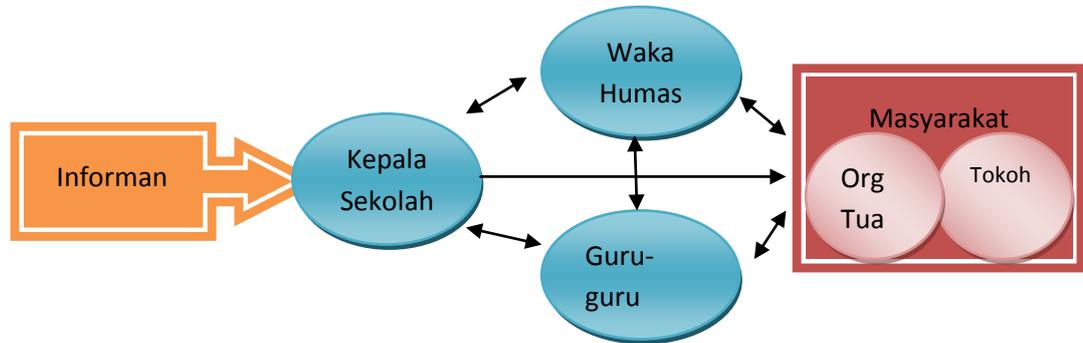
Mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Misalnya peneliti akan mencari faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat, maka peneliti akan mengumpulkandata dari kepala sekolah, wakasek humas, orang tua murid, tokoh masyarakat, dan guru-guru. Data dari kelima sumber tersebut dideskripsikan, dikelompokkan, mana pendapat yang sama, dan

---

<sup>105</sup> Hamidi, *Peneliti Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Penelitian*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), Hal.85.

manaYang berbeda kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Contoh alur triangulasi sumber:

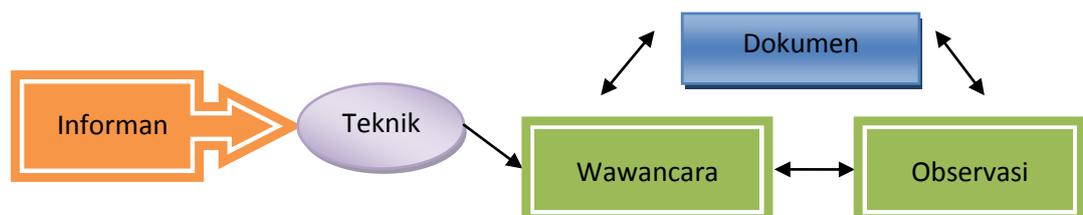


**Gambar 3. Triangulasi Sumber**

Sumber data : Djam'an Satori, Aan Komariah (2009)

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya peneliti ingin mengungkapkan data tentang prestasi akademik siswa, peneliti akan mewawancarai bagian kurikulum, kemudian dibuktikan dengan dokumen dan dikuatkan pula dengan hasil observasi peneliti. Seperti dalam skema berikut:



**Gambar 4. Triangulasi Teknik**

Sumber data : Djam'an Satori, Aan Komariah (2009)